

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi. Salah satu wujud dari demokrasi adalah dilaksanakannya sebuah pemilihan umum atau pemilu yang menjadi sarana untuk membentuk atau memilih orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam hal ini pemerintah (eksekutif) dan juga legislator di parlemen (legislatif). Melalui pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Pemilu merupakan salah satu pilar utama di negara demokrasi dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sebelas kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, 2019. Menurut Undang-Undang no 7 tahun 2017, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota, serta juga melakukan pemilihan terhadap Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Salah satu kekuatan politik yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh para peserta pemilihan umum untuk meraup suara adalah Organisasi Masyarakat Sipil (ormas). Kekuatan ormas terletak pada jumlah massa yang riil hingga tingkat akar rumput. Maka tidak mengherankan apabila kemudian peserta pemilu menggunakan strategi untuk mendekati ormas dengan menjalin deal-deal politik. Hal ini yang akhirnya menyeret keterlibatan ormas untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum agar memobilisasi dan mengamankan suara dari massa yang dimiliki organisasinya.²

Organisasi masyarakat sipil/*civil society* sebagai salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad AS Hikam harusnya memiliki kemandirian (*autonomy*) tinggi yang ketika berhadapan dengan negara serta bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), serta keterikatan dengan norma-norma atau nilai hukum yang dipatuhi oleh warganya. Serta berfokus dalam konteks pembuatan kebijakan publik seperti advokasi atau lobi terhadap isu yang sedang dibahas dalam proses pembuatan undang-undang.³

Dalam konteks ini, *civil society* sebagai kelompok kepentingan yang akan melobi partai politik di DPR RI/DPRD untuk mendorong dan

¹ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

² Triastika Auliyatin. Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil, Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014. Skripsi Universitas Airlangga, 2015. Hlm 5.

³ Muslim Mufti, *Kekuasaan politik di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia). 2013. Hlm. 224.

mendiskusikan kepentingan yang mereka ajukan. Sebagai organisasi yang independen dari kepentingan politik, *civil society* juga memiliki peran untuk memonitor janji-janji kampanye para kandidat dan partai perilaku para politisi di DPR. Dalam kesempatan yang berbeda, *civil society* juga dianggap sebagai wadah untuk berdiskusi tentang berbagai hal-hal penting terkait dengan isu-isu yang mereka butuhkan saat itu.⁴

Beberapa contoh kasus di Indonesia, ormas acap kali berpengaruh dalam proses pemenangan kandidat dalam pemilu. Seperti yang terlihat dalam pemilihan umum 2014, keberadaan Fatayat NU Cabang Kota Surabaya yang seharusnya otonom harus terlibat secara aktif untuk memobilisasi masa yang dimilikinya untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif di Dapil Jawa Timur 1 yaitu Fandi Utomo hingga terpilih menjadi Anggota DPR RI.⁵ Pada pemilu selanjutnya, Lebih dari 3 ribu ibu-ibu anggota Fatayat NU dari seluruh wilayah Kota Surabaya hadir dalam pertemuan untuk mendukung Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (caleg) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019.⁶

Sebagai salah satu roda penggerak NU yang memiliki fanatisme sangat kuat secara struktur kelembagaan, Fatayat hadir sebagai garda terdepan pengawal serta menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Nahdhatul Ulama. Pada tahun 1950 an muncul gagasan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mencalonkan anggota DPR, DPRD dan Kostituante

⁴ *Ibid.*

⁵ Triastika Auliyatin, *Log.Cit.*

⁶ AntaraNews. *Fandi Utomo dekati Fatayat NU.*
<https://jatim.antaranews.com/berita/286157/fandi-utomo-dekati-fatayat-nu>. Diakses pada 5 Agustus 2023.

dari kalangan perempuan, pada saat pemilu pertama tahun 1955 NU mengirimkan 45 wakilnya ke lembaga *legislative*, dengan 5 orang diantaranya merupakan representasi dari kalangan perempuan melalui partai Masyumi.⁷

Fatayat dengan spirit perjuangan begitu kuat akhirnya masuk ke dalam kepentingan politik praktis. Peran ulama begitu kuat dalam subordinasi hak politik Fatayat guna mendapatkan dukungan dari Fatayat. partai dengan afiliasi islam memang selama ini menjadi representasi pilihan politik para Fatayat NU. Semangat juang serta militansi secara kultural, sistem satu komando Fatayat menjadi salah satu organisasi perempuan yang mempunyai basis suara begitu kuat di Indonesia. Tujuan edukasi keagamaan, sosial dan budaya guna mengamalkan nilai-nilai keislaman ditumpangi dengan kegiatan politik secara kelembagaan.

Sebagai sebuah Badan Otonom NU yang seharusnya independen dan netral, tidak menjadikannya terlepas sama sekali dalam dinamika kontestasi politik. Hal ini karena dengan jumlah massa yang tidak sedikit mengakibatkan organisasi sosial keagamaan ini berada pada posisi tawar menawar yang tinggi dan diperebutkan karena kemampuannya untuk memobilisasi dukungan suara dari masa yang dimiliki untuk meloloskan peserta pemilu mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan.

Seperti pada pemilu 2019, Fatayat NU Jambi kompak sebagai badan otonom NU mendukung penuh pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin pada pilpres 2019. Kehadiran serta pengaruh sosok kyai ternama dari kalangan NU

⁷ Arsian Inggang Dwi Nanda. Fanatisme Fatayat Nu Dalam Gerakan Sosial Politik Praktis Pilpres 2019 Di Kota Malang. Skripsi Universitas Airlangga, 2020. Hlm 2.

(Ma'ruf Amin) menjadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan.⁸ Selain itu, Fatayat NU Jambi juga cenderung mengarahkan dukungannya kepada calon anggota *legislative* dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai *underbow*/ badan otonom NU dilihat dari latar belakang sejarah dan perjalanannya Fatayat NU memiliki hubungan kedekatan dengan salah satu partai besar berlatar belakang NU yakni PKB.

Sejak dari pemilu tahun 1955 hingga sekarang keterwakilan perempuan NU terwakili dalam parlemen. Persebaran anggota di seluruh wilayah NKRI, Fatayat menjadi salah satu objek yang disubordinasikan oleh sebagian aktor politik guna mendapatkan irisan suara mereka. Persebaran Fatayat di masing-masing daerah sudah terbentuk secara struktural mulai tingkatan ranting, cabang, wilayah hingga pusat, garis haluan organisasi juga bersifat *top down* sehingga mempermudah pada saat konsolidasi. Secara kelembagaan Fatayat mengalami pergeseran nilai secara kultur organisasi, proses transformasi begitu panjang membuat beberapa pihak melihat adanya potensi dalam organisasi Fatayat dalam kontestasi politik.⁹ Provinsi Jambi, berdasarkan *survey Public Trust Insititute*, 50% Masyarakat Jambi merupakan warga yang berlatar belakang NU. Jika dilihat dari jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) angka 50% warga NU adalah sebanyak setengah dari 2.410.660 yakni 1.205.330. Menjadi wajar ketika NU memiliki pengaruh yang signifikan.

⁸ Detik News. *NU Jambi akan Dukung Penuh Jokowi-Maruf amin di Pilpres 2019*. <https://news.detik.com/berita/d-4210957>. Diakses pada 27 Februari 2023.

⁹ Arsian Inggang Dwi Nanda. *Op.Cit.* Hlm 3.

Momentum kontestasi pemilu dari masa ke masa, anggota Fatayat terlibat dalam kegiatan politik praktis baik sebagai pendukung mobilisasi caleg perempuan berlatar belakang NU maupun sebagai calon anggota legislative baik tingkat kota, provinsi dan pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *tasamuh* dan *tawadu* pada intruksi maupun arahan dari tokoh sentral NU dan Ulama juga sebagai upaya untuk mewakili suara perempuan di parlemen. Pada pemilu 2019 di Jambi, Mewakili kader Fatayat NU Jambi, Siti Rahmi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI dapil Jambi dari partai PKB. Berikut daftar caleg perempuan NU pada pileg 2019.

Tabel 1.

Daftar Caleg Perempuan berlatar belakang NU pada pileg 2019

No	Nama	Tingkatan dan Dapil	Keterangan
1	Elviana (Non Partisan)	DPD RI Dapil Prov. Jambi	Terpilih
2	Siti Rahmi (PKB)	DPR RI Dapil Prov. Jambi	Tidak Terpilih
3	Fika Novita Sari (PKB)	DPR RI Dapil Jambi	Tidak Terpilih
4	Mawaddah Warohmah (PKB)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 (Kota Jambi)	Tidak Terpilih
5	Mahmuda (Golkar)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 (Batanghari-Muaro Jambi)	Tidak Terpilih
6	Eka Marlina (PKB)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 5 (Bungo-Tebo)	Terpilih
7	Ria Juliana (PAN)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 (Batanghari-Muaro Jambi)	Tidak Terpilih
8	Hariratul Jannah (PKB)	DPRD Kota Jambi Dapil 3 (Telanaipura, Danau Teluk dan Danau Sipin)	Tidak terpilih
9	Arianti (Gerindra)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 (Kota Jambi)	Tidak Terpilih

10	Lidya Elfayuni (PKB)	DPRD Kabupaten Tebo Dapil 2 (Tebo Ilir, Tengah Ilir dan Muara Tabir)	Tidak Terpilih
11	Syofni Herawati (PKB)	DPRD Kota Jambi Dapil 1 (Kota Baru)	Terpilih
12	Supingah (PKB)	DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 (Batanghari-Muaro Jambi)	Tidak Terpilih
13	Anita Kusumawati (PKB)	DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1 (Tebo Tengah, Sumay dan Rimbo Ilir)	Tidak Terpilih
14	Nuraini (Gerindra)	DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 4 (Mestong, Sungai Bahar, Bahar Utara dan Bahar Selatan)	Tidak Terpilih
15	Fitri Yanti (PKB)	DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 (Sekernan, Maro Sebo dan Taman Rajo)	Tidak Terpilih
16	Zainab (NasDem)	DPRD Kota Jambi Dapil 3 (Telanaipura, Danau Teluk dan Danau Sipin)	Tidak Terpilih
17	Wiji Susyani (PKB)	DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 5 (Jambi Luar Kota)	Terpilih
18	Rosmala Dewi (PKB)	DPRD Kabupaten Bungo Dapil 1 (Pasar Bungo, Bathin 2 Babeko, Bathin 3 dan Rimbo Tengah)	Terpilih
19	Nurasiah (PKB)	DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 1 (Bram Itam, Tungkal Ilir dan Seberang Kota)	Terpilih

Sumber: Data Olahan

Masalah ini menjadi menarik dalam konteks Jambi, karena dari banyaknya caleg perempuan NU, hanya beberapa yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif. Fatayat NU merupakan badan otonom NU yang

beranggotakan perempuan muda NU. Dimana walaupun organisasi tersebut merupakan sebuah badan yang berdiri sendiri tetapi bukan berarti terlepas dari NU. Karena terdapat kecenderungan bahwa sebagai badan yang berada dibawah naungan NU dan anggotanya secara keseluruhan perempuan tentu harus mematuhi semua himbauan yang telah dikeluarkan oleh kyai. Ini diakibatkan karena adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sosok kyai dalam menentukan arah politiknya.

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi merupakan mengklaim memiliki jumlah anggota kurang lebih 5.000 perempuan yang tersebar di 128 Kecamatan. Sebagaimana Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jambi Sri Rahayu mengatakan, Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang mewadahi perempuan-perempuan muda NU. Fatayat NU bahkan memiliki jejaring kepengurusan yang kuat dari level pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan. Untuk Provinsi Jambi sendiri, Fatayat NU telah terbentuk di seluruh kabupaten kota yakni dengan terbentuknya 11 PC dengan 128 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 141 kecamatan di Provinsi Jambi, serta ratusan ranting di level desa/kelurahan.¹⁰ Seharusnya dengan keberadaan kader dan jaringan yang signifikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu meraih perolehan suara.

Penelitian serupa juga diteliti oleh Triastika Auliyatin dengan judul “Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil,

¹⁰ NU Online.or.id. *Di Jambi Fatayat NU Tersebar di 128 Kecamatan.* <https://www.nu.or.id/daerah/di-jambi-fatayat-nu-tersebar-di-128-kecamatan-HG1U0>. Diakses pada 26 Februari 2023.

Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014”, menjelaskan bahwa Fatayat NU Cabang Kota Surabaya yang berafiliasi dan mengarah pada salah satu partai politik.

Selain itu, penelitian terdahulu dari M. Reza Yudistira¹¹ dalam penelitiannya yang bertema Afiliasi Pilihan Warga NU Surabaya Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 Putaran Kedua memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi afiliasi politik warga NU diantaranya adalah faktor pola patronase politik (pola hubungan patron klien yang khas pada tubuh NU), sosial ekonomi, jenis kelamin, latar belakang NU yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan, konflik internal di tubuh PKB.

Sementara M.Faridz Afif¹² dalam skripsinya yang berjudul Afiliasi Politik Gerakan Pemuda Ansor dalam Pemilihan Gubernur 2008 di Jawa Timur memberikan kesimpulan bahwa yang mempengaruhi afiliasi politik Gerakan Pemuda Ansor antara lain adalah kepentingan dari anggota GP Ansor yang beragam. Maka penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana pola afiliasi politik NU dalam hal ini melalui Fatayat NU Provinsi Jambi. Penulis kiranya merasa tertarik untuk mengambil tema seputar **“Politik Afiliasi Fatayat Nahdlatul Ulama Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pileg 2019 Provinsi Jambi”**.

¹¹ Reza Yudistira, “*Afiliasi Pilihan Warga NU Surabaya Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 Putaran Kedua*”, (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2009)

¹² Faridz Afif, “*Afiliasi Politik Gerakan Pemuda Ansor dalam Pemilihan Gubernur 2008 di Jawa Timur*”, (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor yang menentukan ketelibatan Fatayat NU Jambi dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan NU pada pileg 2019?
2. Bagaimana keterlibatan fatayat NU Jambi dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan NU pada pileg tahun 2019?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor-faktor keterlibatan Fatayat NU Jambi dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan NU pada pileg 2019.
2. Untuk memahami keterlibatan Fatayat NU Jambi dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan NU pada pileg 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik terkait Pemilu umum dan afiliasi politik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

untuk mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk mengkaji permasalahan yang sama secara lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai afiliasi politik organisasi masyarakat sipil, keterlibatan dan dampaknya terhadap kemenangan kandidat calon.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Modal Sosial

Robert Putnam dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993), mendefinisikan modal sosial sebagai “*features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit*”¹³, ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama.

Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari “*networks of civic engagements*” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar

¹³ Robert Putnam dengan Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993. Hlm 36.

dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut .

Selanjutnya, Robert Putnam, mengungkapkan modal sosial mengacu pada hubungan sosial dan norma serta kepercayaan yang menyertainya. Siapa yang diuntungkan dalam hubungan/koneksi, norma, dan kepercayaan ini-individu, komunitas yang lebih luas harus ditentukan secara empiris, bukan definisi). Maksudnya dalam modal sosial mengacu pada hubungan antara individu yang satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kepercayaan diantara mereka. Secara sederhana, Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama¹⁴.

Adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut

¹⁴ Moch Nurhasim, Dkk. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Jakarta, 2003. Hlm 3.

Putnam menyimpulkan modal sosial merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.

Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.¹⁵

1.5.2 Politik Afiliasi

Afiliasi dalam konteks umum merujuk pada hubungan kerja sama, pertalian keluarga, atau keterikatan dengan suatu lembaga yang menjalin sebuah hubungan yang dapat memberikan timbal balik dan saling

¹⁵ Rusydi Syahra, *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003. Hlm 6.

memberikan pengaruh yang sama¹⁶. Dalam politik, afiliasi menggambarkan hubungan yang terjalin antara individu atau kelompok dengan partai politik, organisasi, atau komunitas tertentu yang memiliki kesamaan ideologi, kepentingan, atau tujuan. Afiliasi politik dapat berbentuk hubungan formal, seperti keanggotaan dalam partai politik, maupun hubungan informal, seperti keterikatan emosional atau ideologis dengan kelompok tertentu yang berperan dalam proses politik.¹⁷

Politik afiliasi sendiri merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok membangun hubungan politik berdasarkan kesamaan nilai, ideologi, atau kepentingan strategis. Afiliasi ini seringkali menjadi faktor penting dalam mendukung kandidat atau partai dalam pemilihan umum, karena jaringan yang terjalin memungkinkan mobilisasi dukungan yang lebih luas¹⁸. Dalam praktiknya, politik afiliasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti dukungan dari organisasi keagamaan, kelompok etnis, atau komunitas sosial yang memiliki kesamaan identitas dan tujuan politik.

Dalam politik elektoral, afiliasi politik sering digunakan sebagai modal sosial yang memperkuat kepercayaan antara kandidat dan pemilih. Misalnya, dalam konteks Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), keterlibatan organisasi ini dalam mendukung calon anggota legislatif perempuan menunjukkan bagaimana afiliasi ideologis dan keagamaan dapat memengaruhi preferensi

¹⁶ HARIS, H. (2018). *Patronase dan Afiliasi Santri pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

¹⁷ Sanawiyah, A. (2020). *Afiliasi Politik Santri Dalam Pilkada Nagan Raya 2017* (Bachelor Thesis, UIN AR-RANIRY).

¹⁸ Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Jakarta: Guepedia. Hlm. 45.

pemilih. Kandidat yang memiliki hubungan erat dengan organisasi berbasis massa sering kali mendapatkan keuntungan elektoral karena dianggap memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan komunitasnya. Dengan demikian, politik afiliasi berperan penting dalam membangun strategi kemenangan dengan mengandalkan jaringan sosial dan kepercayaan kolektif.

Politik afiliasi dapat dipengaruhi oleh beberapa pengaruh utama yang membentuk hubungan antara individu, kelompok, dan entitas politik. Berikut adalah beberapa indikator utama yang memengaruhi politik afiliasi¹⁹:

1.) Kesamaan Ideologi dan Nilai

Afiliasi politik sering kali terbentuk karena adanya kesamaan ideologi, visi, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok dengan partai politik atau calon tertentu. Kesamaan ini menciptakan rasa keterikatan dan loyalitas yang kuat, seperti yang terlihat dalam dukungan kelompok keagamaan atau organisasi sosial terhadap kandidat yang memiliki latar belakang serupa.

2.) Jaringan Sosial dan Hubungan Kelembagaan

Jaringan sosial memainkan peran penting dalam politik afiliasi, di mana keterhubungan dengan komunitas tertentu memungkinkan mobilisasi dukungan yang lebih efektif. Hubungan kelembagaan, seperti keanggotaan dalam organisasi keagamaan atau kelompok sosial, juga memperkuat afiliasi politik karena memberikan akses terhadap sumber daya dan dukungan kolektif.

¹⁹ Sanawiyah, A. *Loc.Cit...*

3.) Kepercayaan dan Kredibilitas

Kepercayaan terhadap kandidat atau partai politik menjadi faktor kunci dalam membangun afiliasi politik. Kandidat yang memiliki rekam jejak baik, hubungan erat dengan komunitas, serta dianggap mampu mewakili kepentingan kelompok tertentu lebih mudah mendapatkan dukungan. Kredibilitas juga dapat diperkuat melalui peran organisasi dalam merekomendasikan kandidat kepada anggotanya.

4.) Mobilisasi dan Dukungan Struktural

Politik afiliasi sering kali diperkuat oleh upaya mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok pendukung, seperti organisasi masyarakat, komunitas agama, atau jaringan sukarelawan. Struktur organisasi yang kuat mempermudah penyebaran informasi, kampanye, serta penggalangan suara dalam pemilihan.

5.) Manfaat dan Kepentingan Bersama

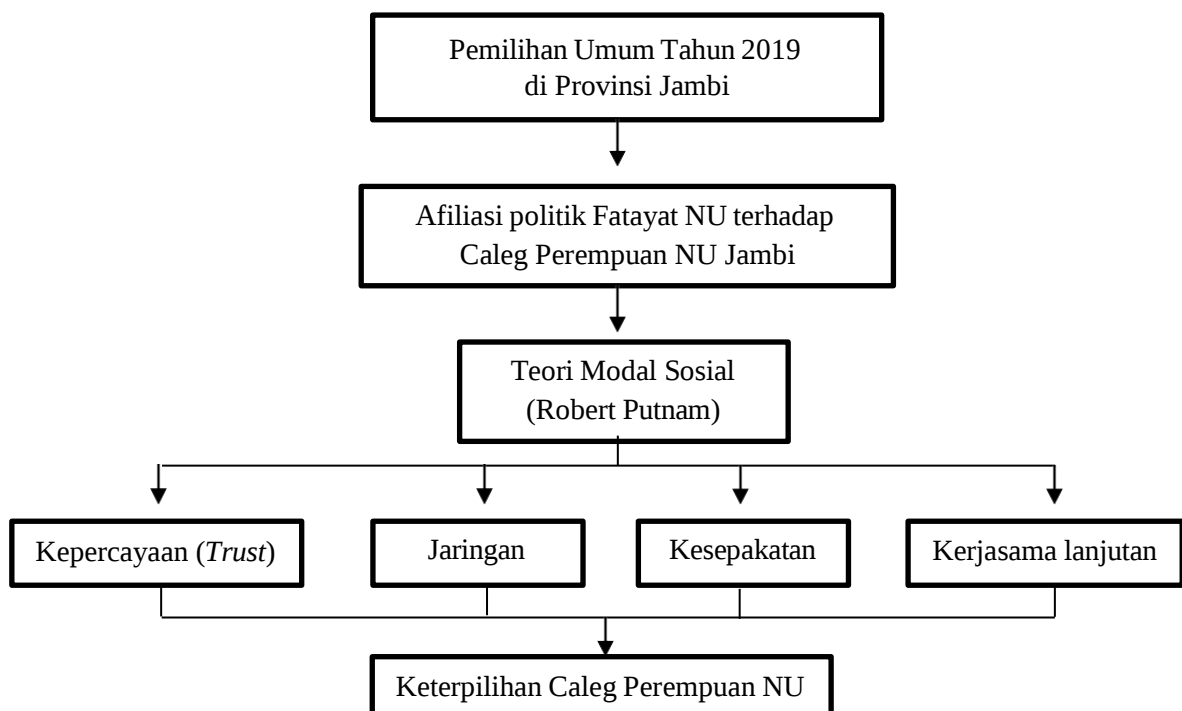
Faktor pragmatis seperti manfaat langsung atau kepentingan bersama juga dapat menjadi indikator politik afiliasi. Kelompok yang merasa bahwa kandidat tertentu dapat memberikan keuntungan politik, ekonomi, atau sosial bagi komunitasnya cenderung membangun afiliasi lebih kuat.

Dari indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik afiliasi bukan hanya sekadar hubungan emosional atau ideologis, tetapi juga didukung oleh struktur sosial, kepercayaan, serta kepentingan strategis yang saling menguntungkan.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penulis dalam rangka menyusun juga menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu diperlukan suatu kerangka pikir yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Berikut ini kerangka pikir pada penelitian ini.

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir



Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Adanya jaringan atau hubungan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat dalam hal ini hubungan antara masyarakat NU secara umum, Fatayat NU dan kandidat caleg perempuan NU. Dari sebuah jaringan dan hubungan sosial yang terbentuk kemudian tumbuh sebuah Kepercayaan (*trust*) yang memiliki

implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Dalam konteks ini rasa percaya masyarakat NU dan fatayat yang kemudian tergerak untuk memilih caleg yang berlatar belakang NU.

Hingga pada akhirnya berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerja sama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Dalam konteks ini bisa termasuk adanya perjanjian secara tidak langsung yang dibangun antara Masyarakat NU, Fatayat dan Caleg perempuan NU pada pileg 2019.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁰. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan dasar keilmuan. Dasar keilmuan yang dimaksud adalah rasional, empiris dan sistematis.²¹

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif penulis anggap tepat untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Penulis beranggapan melalui metode penelitian kualitatif, akan membawa penulis mengetahui fenomena secara

²⁰ Sugiyono., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung Alfabeta, 2013. Hlm. 2.

²¹ *Ibid.*

lebih kompleks, mendalam dan juga menyeluruh yang pada akhirnya didapatkan suatu penjelasan yang rinci dari suatu permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan langkah kerja untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.²²

Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan²³.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang diperlukan selama penelitian, sesuai dengan judul yang diambil, penulis mengambil lokasi di Kantor atau Sekretariat Pengurus Wilayah Fatayat NU Provinsi Jambi yang berada di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana afiliasi politik serta apa yang dampak yang dihasilkan dari afiliasi politik Fatayat NU Provinsi Jambi pada pemilu 2019.

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung, 2009. Hlm. 28.

²³ *Ibid.*

1.7.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli atau data yang langsung diberikan kepada pengumpul data²⁴. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian. Singkatnya, data primer adalah keseluruhan data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan.

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen²⁵. Data sekunder dapat dikatakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur berupa buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan). Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan sumber data dengan tujuan tertentu. Teknik penentuan informan ini menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis.²⁶ Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

²⁴ Sugiyono, *Op. Cit.* Hlm 225.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* Hlm 48.

Tabel 2. Daftar Informan

Nama	Jabatan/Posisi	Keterangan
Sri Rahayu	Ketua PW Fatayat	Mengetahui dinamika Fatayat pada pileg 2019
Eka Marlina	Caleg DPRD Provinsi Jambi Terpilih (Perempuan NU)	Mengetahui Dinamika pileg 2019, dan penulis merasa perlu dalam mengetahui menegai pemanfaatan politik apiliasi Fatayat NU.
Syofni Herawati	Caleg DPRD Kota Jambi Terpilih (Perempuan NU)	Mengetahui Dinamika pileg 2019, dan penulis merasa perlu dalam mengetahui menegai pemanfaatan politik apiliasi Fatayat NU.
Siti Rahmi	Caleg DPR Dapil Jambi Tidak terpilih (Perempuan NU)	Mengetahui Dinamika pileg 2019, dan penulis merasa perlu dalam mengetahui menegai keagalanya dalam pemanfaatan politik apiliasi Fatayat NU.
Mawaddah Warohmah	Caleg DPRD Provinsi Jambi Tidak terpilih (Perempuan NU)	Mengetahui Dinamika pileg 2019, dan penulis merasa perlu dalam mengetahui menegai keagalanya dalam pemanfaatan politik apiliasi Fatayat NU
Pahrudin	Pengamat Politik	Mengetahui Persepsi Masyarakat dalam memilih

Sumber : Data Diolah Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan dalam Penelitian untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, dan penyelidikan riset. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah disusun. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya yang mana dengan kegiatan tersebut dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Cara yang dipilih oleh peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data-data yang diperoleh baik primer maupun sekunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

3. Verifikasi dan Penyimpulan

Data Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 25 Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang memanfaatkan beberapa sumber informasi berbeda untuk menguji kebenaran mengenai fenomena di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe triangulasi yaitu :

- 1) Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data (primer dan sekunder) dalam suatu penelitian.
- 2) Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda dalam dalam suatu penelitian.